

Esai

Kekuasaan yang Tak Terjemahkan: Politik Bahasa di Indonesia Pascakolonial

Rachmi Diyah Larasati

Interdisciplinary Center for the Study of the Global Change, University of
Minnesota

Email: laras001@umn.edu

Gaya Bahasa dan Otoritarianisme

Pergantian kepemimpinan nasional yang diresmikan pada Oktober 2024 membawa perubahan signifikan dalam ranah diskursus politik, terutama pada pola komunikasi yang mencerminkan gaya kepemimpinan dalam praktik bernegara. Kehadiran bahasa dalam berbagai konteks politik kini tidak hanya menjadi sarana diplomasi atau representasi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi cermin etika komunikasi dalam merespons kepentingan publik. Bahasa, dalam proses lahirnya kebijakan dan pembentukan relasi nasional maupun internasional, memainkan peran penting yang bukan sekadar sebagai alat representasi, tetapi juga sebagai penentu logika kekuasaan. Selama setahun pertama pemerintahan ini, muncul gejala “pemburaman makna” dan pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur ketakterjemahan (*untranslatability*) (Apter, 2013) yang tampaknya sengaja diproduksi untuk menolak kritik dan meneguhkan kuasa secara simbolik. Gaya bahasa semacam ini menunjukkan kecenderungan otoritarian dan menimbulkan efek teror afektif, khususnya terhadap kelompok perempuan. Lydia Liu, dalam *Clash of Empires* menyebut fenomena semacam ini sebagai bentuk “*primitivity*” dalam ikon yang *mimetik* yakni reproduksi kekuasaan melalui tanda dan citra (Liu, 2004). Konsep ini mengingatkan pada pandangan Antonio de Nebrija dalam Castilian Grammar, yang menulis bahwa “*language has always been the companion of empire*” (Nebrija, 1492). Pandangan Nebrija tersebut menggambarkan bagaimana bahasa sejak awal dikonstruksi sebagai perangkat pengendalian kolonial dan

penyebaran kekuasaan. Fenomena serupa tampak dalam praktik komunikasi publik masa kini melalui gestur dan pilihan kata yang agresif, seperti seruan “*ndasmu!*” dalam forum resmi yang menandai pewarisan bentuk kuasa imperial dalam tubuh bahasa politik. Bahasa tubuh dan ujaran seperti ini berfungsi sebagai perpanjangan kuasa imperial (*imperial extension of power*) (Liu, 2004). Dalam konteks ini, gaya komunikasi yang bersifat performatif dan represif dapat dibaca sebagai *subteks fasisme*: strategi bahasa yang menanamkan rasa takut sekaligus menormalisasi kekuasaan di tengah masyarakat.

Tulisan ini lahir ketika Jakarta dilanda bara dan riuh: suara protes, teriakan pencari keadilan, iring-iringan mobil Brimob hingga penjarahan rumah warga, sebuah lanskap yang menyerupai persiapan perang. Kegaduhan di ruang terbuka itu, beserta representasinya di media massa, menampilkan visualisasi kekerasan yang melampaui fungsi representatifnya. Kekerasan tak lagi sekadar ditampilkan, melainkan diulang-ulang sebagai dramatisasi kuasa yang menggambarkan sebuah bentuk kepuasan psikologis negara atas dominasi yang diperankan kembali. Pewartaan yang berulang atas kekerasan menjadikan representasi itu sendiri sebagai kekerasan baru yaitu sebuah jebakan yang justru memperlambat proses pencarian keadilan (Hartman, 2022). Ketika kekerasan dan gambarnya saling melipat, muncullah kontestasi kepercayaan terhadap *subjectivity* yakni siapa yang dianggap benar, siapa yang dituduh provokator, dan siapa yang boleh berbicara. Kemudian muncullah pertanyaan: apakah kekacauan semacam ini memang dirancang agar mesin pengelola kekuasaan sulit diidentifikasi? (Maldonado, 2008).

Dalam konteks ini, bahasa kerap disalahgunakan. Dalam artian, bahasa sengaja dipakai untuk merancukan konteks perjuangan rakyat mulai dari isu agraria, pendidikan, kesenian, hingga komunikasi itu sendiri.

Agustus yang Mencengangkan

Peristiwa di akhir Agustus memperlihatkan perbedaan tajam dalam respons aparat: antara kepolisian, militer, dan masyarakat non-elite yang teradu domba di antara dua kepingan kekuasaan. Di tingkat wacana, narasi negara danandingannya saling bertubrukan, menciptakan ruang kelam yang diisi oleh tuduhan “provokator,” penangkapan, penyitaan buku, dan penyensoran media sosial. Kekerasan simbolik dan fisik berpadu dalam satu jaringan kontrol yang meneguhkan represi terhadap kritik dan ekspresi publik.

Tulisan ini tidak didedikasikan untuk menelusuri siapa yang terlibat atau apa motif di balik protes dan provokasi, melainkan untuk menelaah bagaimana bahasa bekerja sebagai dasar kebudayaan dan politik bernegara. Dalam setahun terakhir, tampak jelas menguatnya modus *fasisme* dan *otoritarianisme* baru yaitu gaya kenegaraan yang bersifat represif, baik dalam ranah intelektual, sosial, maupun hukum. Fenomena ini menampilkan kesinambungan dengan pola neo Orde Baru, di mana represi menjadi modus keseharian yang menormalisasi kekuasaan. Maka dari itu, tulisan ini berfokus pada relasi antara kuasa dan wacana, dengan perhatian khusus terhadap dampaknya bagi masyarakat non-elite. Refleksi ini juga berangkat dari posisi penulis sebagai peneliti kebudayaan yang mengamati bahasa sebagai medan politik, tempat kekuasaan dan makna saling berkelindan.

Sebagai mantan Menteri Pertahanan di era Jokowi dan sosok yang pernah dikaitkan

dengan pelanggaran HAM,¹ Prabowo Subianto membawa beban historis yang membentuk citra politiknya. Riwayat pelanggaran masuk ke sejumlah negara menandai bagaimana sejarah dan citra kekuasaan saling bertaut. Dalam konteks ini, bahasa menjadi instrumen penting untuk membangun ulang legitimasi politik. Melalui pemetaan semiotik dan perbandingan literatur budaya, tulisan ini menelaah bagaimana warisan kekuasaan 1998 yang seharusnya membuka jalan demokrasi justru melahirkan bentuk baru kooptasi bahasa. Politik identitas dan dinasti kekuasaan menghidupkan kembali gaya lama yang kini dibungkus sebagai “kebijakan.” Di sini, bahasa menjadi bahasa kekerasan: instrumen kontrol yang halus namun efektif.

Penulis meyakini bahwa pemahaman atas bahasa, kebudayaan, dan politik merupakan kunci untuk membaca tata pemerintahan yang adil dan kuat. Ketika bahasa berubah menjadi alat opresi dan simbol otoritas yang bersifat *fascist*, negara justru memperlihatkan performa kontrol yang menindas kritik dan memproduksi disiden. Dalam situasi demikian, kekerasan menjadi *kontinuum* yang artinya sebuah keadaan yang menormalisasi represi dan mengikis kekuatan sosial masyarakat. Negara yang menertawakan kritik dengan ungkapan seperti “*biarkan anjing menggonggong*” atau “*ndasmu*,” sesungguhnya sedang mempraktikkan *hermeneutika fasisme* (Neocleous, 1997). Suatu bentuk *ego melancholia* sebagaimana dibahas Emily Apter, di mana bahasa kekuasaan memakan dirinya sendiri dalam lingkaran kontrol dan kehilangan empati (Apter, 2013).

Persiapan dan Tanda-Tanda

Pemikiran Emily Apter tentang *Untranslatability* memberi landasan penting untuk membaca fenomena bahasa kekuasaan di Indonesia hari ini. Apter menyebut bahwa bahasa memiliki dimensi yang tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan lintas konteks internasional yaitu sebuah wilayah makna yang menolak penyamaan total (Getachew, 2022). Dalam kerangka itu, gaya komunikasi politik yang manipulatif bukan hanya bentuk ekspresi spontan, melainkan sesuatu yang disiapkan dan disusun secara terstruktur sebagai strategi pemerintahan.

Salah satu contoh paling nyata terlihat pada konstruksi citra politik melalui tubuh dan koreografi. Bahasa tubuh menjadi wacana yang tidak kalah kuat dari bahasa verbal: ia membentuk persepsi publik tentang siapa sosok politik itu, bagaimana ia ingin dikenali, dan emosi apa yang ingin ia bangkitkan. Dalam konteks kampanye presiden terakhir, istilah “*Gemoy menari*” muncul sebagai simbol yang menarik. Tarian yang tampak lucu dan genit itu menyatukan feminitas, humor, dan parodi dalam satu performa yang dirancang rapi untuk memanipulasi kedekatan dengan publik. Dalam bahasa Indonesia, “*gemoy*” sering dipakai dengan nada ambigu: antara kasih sayang dan ejekan. Ketika digunakan dalam ranah politik, ia memunculkan permainan makna yang memasukkan tubuh maskulin militeristik ke dalam citra yang imut dan menggemaskan. Di sinilah politik tubuh bekerja: tarian menjadi alat untuk menutupi masa lalu kekerasan dan menampilkan sosok yang “baru,” lebih ringan, bahkan menghibur. Ironisnya, performa tersebut muncul dari figur

¹ <https://www.pbs.org/newshour/world/indonesian-defense-minister-once-banned-by-u-s-for-human-rights-abuses-declares-victory-in-presidential-election> and silahkan lihat: Caraway, T. L. (2023). Labor's reversal of fortune: contentious politics and executive aggrandizement in Indonesia. *Social Movement Studies*, 22(5–6), 689–705

yang juga dikenal sebagai mantan pemimpin pasukan kematian (*death squad*) di masa lalu.²

Panduan Sosial Internasional dan Bahasa Kebijakan

Pada masa pandemi sekitar tahun 2020, muncul bentuk-bentuk baru bahasa kebijakan yang menunjukkan bagaimana negara menata jarak, ruang, dan tubuh warganya. Di tengah kekosongan ruang publik, pemerintah, seniman, dan intelektual membangun diksi serta wacana baru yang merefleksikan posisi mereka terhadap rakyat, sebuah praktik yang dalam studi budaya disebut posisionalitas.

Ruang publik yang sebelumnya hidup oleh interaksi langsung berubah menjadi ruang digital yang sunyi. Jalan-jalan, gedung pemerintahan, dan panggung pertunjukan menjadi kosong; tubuh-tubuh digantikan oleh citra visual di layar *Zoom* atau *YouTube*. Situasi ini memengaruhi cara kita berbahasa, berepresentasi, dan memaknai kehadiran. Dalam ruang yang nisbi itu, sebagian filsafat tubuh dan keberadaan yang biasanya berakar pada kedekatan dan kerja fisik mengalami kehilangan makna. Di saat bersamaan, muncul bahasa kebijakan baru yang bersifat universal dan transnasional, seperti istilah “penataan ruang,” “relokasi,” atau “normalisasi.” Kata-kata ini menggantikan istilah lama seperti “penggusuran,” sehingga kekerasan administratif tampak lebih rasional dan bermoral. Bahasa, dalam hal ini, menjadi alat moralitas palsu yang menetralkan penderitaan rakyat.

Namun, di sisi lain, rakyat menanggapi situasi itu dengan kebudayaan mereka sendiri. Solidaritas lokal, bantuan pangan, gotong royong, dan humor kolektif menjadi bentuk bahasa tandingan yang tidak tercatat dalam

panduan internasional. Dari sinilah terlihat kontras antara bahasa kebijakan negara yang steril dan bahasa keseharian rakyat yang hidup dan berbelas kasih.

Tulisan ini mencoba menandai keriuhan kartografi kuasa antara partisipasi rakyat dan strategi penguasaan ruang oleh negara. Kekuatan kolektif rakyat yang lahir dari bawah bukanlah ekspresi identitas tunggal seperti agama atau partai, melainkan bentuk keberlanjutan etika sosial yang melawan banalitas kekuasaan. Bahasa menjadi medan utama pertarungan ini: bagaimana negara menggunakan bahasa untuk merasionalisasi represi, sementara rakyat menggunakan bahasa untuk bertahan, merawat, dan menamai penderitaan mereka. Bahasa keputusan dan bahasa janji, pada akhirnya, sering berbalik menjadi paradoks: alih-alih melindungi rakyat, ia menegaskan jarak antara hukum dan keadilan.

Salah satu contoh paling jelas dari politik bahasa dalam kekuasaan dapat ditemukan pada bahasa pengakuan hukum di dalam kebijakan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang sering disebut sebagai tonggak penting dalam politik agraria Indonesia menandai awal pengakuan formal terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas wilayahnya sendiri.

Pengakuan itu ternyata bersifat paradoksal. Secara tekstual, negara mengakui hak masyarakat adat untuk memiliki, menguasai, dan mengelola tanah serta praktik budayanya tetapi secara politis dan ekonomi, realisasi hak tersebut terus terhambat oleh kontrak dagang internasional, kepentingan investasi, dan bahasa ekonomi yang lebih dahulu membingkai logika kebijakan negara. Dalam

² Indonesia's next president has a complicated history with the U.S. (2024). In *All Things Considered*. National Public Radio, Inc. (NPR).

konteks ini, *bahasa perlindungan* yang seolah humanis justru berubah menjadi *bahasa penundaan*: janji yang terus diulang tanpa pemenuhan.

Alih-alih menciptakan keadilan, bahasa hukum ini sering berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ia menghasilkan citra nasionalisme baru yang menampilkan diri seolah melindungi, tetapi sebenarnya melanggengkan pola lama: eksploitasi dan oligarki. Tidak mengherankan bila pengakuan internasional terhadap “komitmen Indonesia pada masyarakat adat” sering kali lebih bersifat performatif daripada substantif. Di lapangan, masyarakat adat di hutan, kota, dan wilayah adat terus menghadapi penderitaan yang sama, hanya kini dibungkus dengan diksi yang lebih halus.

Fenomena serupa tampak dalam politik buruh. Bahasa janji dan legalitas kerja yang seharusnya menjadi alat perlindungan sering berubah menjadi instrumen kooptasi. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara sebagian pimpinan serikat buruh dan kandidat presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Dalam perjanjian politik tersebut, sejumlah pimpinan buruh menyatakan dukungan penuh, berharap pada janji kenaikan upah minimum dan perlindungan pekerja (Caraway dan Ford, 2020).

Namun, pada Agustus tahun yang sama, terjadi peristiwa tragis: pembunuhan terhadap aktivis buruh Affan Kurniawan. Peristiwa ini memicu gelombang protes nasional dan memperlihatkan ketegangan antara bahasa janji dan realitas kekuasaan, terutama menyangkut perlindungan pekerja dan kenaikan UMR yang tampaknya tidak bisa diwujudkan. Dukungan simbolik dari presiden pada perayaan ulang tahun Partai Buruh berbanding terbalik dengan meningkatnya kekerasan terhadap kaum pekerja.

Bahasa yang digunakan dalam kebijakan ketenagakerjaan akhirnya tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga menyingkirkan makna solidaritas. Dalam situasi ini, *bahasa janji* berfungsi sebagai perangkat kontrol yang menenangkan protes sambil meneguhkan struktur kekuasaan yang menindas. Kekerasan yang berulang menjadi tanda bagaimana bahasa kekuasaan beroperasi: bukan sekadar alat komunikasi, melainkan mesin ideologis yang memproduksi kepatuhan.

Kekerasan Negara dan Pengkhianatan Pascakolonial

Pemahaman pascakolonial berangkat dari kesadaran bahwa penjajahan tidak hanya terjadi melalui penguasaan wilayah, tetapi juga melalui sistem pengetahuan, bahasa, dan cara berpikir. Pascakolonialitas, dengan demikian, menuntut dua hal: pertama, pembebasan ruang hidup dari warisan kuasa kolonial; dan kedua, pembentukan metodologi berpikir yang mampu melepaskan diri dari kerangka epistemologis penjajahan.

Dalam proses ini, perjuangan pascakolonial tidak berhenti pada momen kemerdekaan, melainkan terus berlangsung dalam bentuk-bentuk baru yaitu di ruang kenegaraan, ruang budaya, maupun ruang diaspora. Konsep-konsep seperti *exile* (Hong, 2006) dan *diaspora revision* menandai bahwa perjuangan pascakolonial adalah perjuangan yang cair, lintas batas, dan tak pernah selesai.

Di Indonesia hari ini, semangat pascakolonial justru sering dikhianati oleh bahasa kekuasaan negara sendiri. Ketika pejabat tinggi termasuk presiden dan para menteri menggunakan bahasa ancaman terhadap kritik, atau menstigmatisasi pengkritik sebagai “pengkhianat bangsa,” mereka secara tidak langsung memperkuat logika kolonial itu sendiri: logika yang menolak perbedaan dan menganggap oposisi

sebagai bahaya. Penggunaan bahasa seperti ini bukan sekadar tindakan politik, tetapi juga kekerasan simbolik terhadap identitas bangsa yang lahir dari semangat kemerdekaan.

Kekerasan itu sering berwujud dalam bahasa hukum, media, dan narasi publik. Misalnya, dalam pelaporan kasus kekerasan aparat terhadap rakyat, istilah seperti *"tubuhnya terlindas mobil polisi"* dipakai untuk menetralkan fakta kekerasan, seolah-olah tubuh manusia hanyalah objek insiden, bukan korban. Bahasa seperti ini melucuti dimensi moral dari tragedi, menjadikannya bagian dari rutinitas birokrasi yang dingin.

Selain itu, penggunaan bahasa kasar dalam ruang publik terutama dalam Bahasa Indonesia dan Jawa menunjukkan degradasi etika politik yang menormalisasi penghinaan terhadap rakyat. Kasus perampasan buku, penahanan aktivis, dan pelarangan diskusi intelektual menunjukkan bahwa negara masih takut pada

pengetahuan yang merdeka. Dalam konteks ini, kooptasi bahasa menjadi kebudayaan bernegara adalah bentuk fasisme yang telah berulang sejak Orde Baru: sebuah sistem yang terus melanggar kekuasaan melalui pengendalian makna.

Tragedi seperti kematian Affan Kurniawan, hilangnya Wiji Thukul, dan ketidakselesaian kasus 1965 memperlihatkan kontinuitas kekerasan negara, sebuah warisan kolonial yang tidak pernah sungguh-sungguh diakhiri. Ketika oligarki kembali menguat di bawah wajah baru pemerintahan, maka bahasa yang seharusnya menjadi ruang kebebasan justru berubah menjadi instrumen represi. Dalam kondisi ini, negara tidak hanya mengkhianati rakyatnya, tetapi juga mengkhianati semangat pascakolonial yang menjadi dasar berdirinya kemerdekaan itu sendiri (Mamdani, 2001).

Referensi

- Apter, E. (2013). *Against World Literature: On the Politics of Untranslatability*. Verso.
- Caraway, T. L. (2023). Labor's reversal of fortune: Contentious politics and executive aggrandizement in Indonesia. *Social Movement Studies*, 22 (5–6), 689–705. <https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2177039>
- Caraway, T. L., & Ford, M. (2020). *Labor and Politics in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Getachew, A. (2022). *Worldmaking After Empire: The Rise and Fall of Self-Determination*. In *The SHAFR Guide Online*. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Hartman, S. V. (2022). *Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth-Century America* (Revised and updated ed.). W. W. Norton & Company.
- Hong, G. K. (2006). *The Ruptures of American Capital: Women of Colour Feminism and the Culture of Immigrant Labor*. University of Minnesota Press.
- Indonesia's next president has a complicated history with the U.S. (2024, February 15). *All Things Considered*. National Public Radio (NPR). <https://www.npr.org>

- Liu, L. H. (2004). *The Clash of Empires: The Invention of China in Modern World Making*. Harvard University Press.
- Maldonado-Torres, N. (2008). *Against War: Views from the Underside of Modernity*. Duke University Press.
- Mamdani, M. (2001). *When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda*. Princeton University Press.
- Neocleous, M. (1997). *Fascism*. University of Minnesota Press.
- PBS News Hour. (2024, February 15). *Indonesian defense minister once banned by U.S. for human rights abuses declares victory in presidential election*. PBS. <https://www.pbs.org/newshour/world/indonesian-defense-minster-once-banned-by-u-s-for-human-rights-abuses-declares-victory-in-presidential-election>

